

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**



Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

**PEMBELAJARAN PANCASILA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
ISLAM DI ACEH: PELAJARAN APA YANG BISA DIPETIK?**

**Oleh :**

**Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul**

**Ketua:**

**Dr. Iswadi, M.Pd (0101117901)**

**Anggota:**

- 1. Prof. Erman Anom, Drs., MM., Ph.D. (0324096301)**
- 2. Muhammad Shaleh Assingkily**
- 3. Herinto Sidik Iriansyah (0003116213)**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2022**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pembelajaran Pancasila ditinjau dari Perspektif Islam di Aceh: Pelajaran Apa yang Bisa dipetik?
2. Ketua tim :
  - a. Nama : Dr. Iswadi, M.Pd.
  - b. NIDN : 0101117901
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - d. Fakultas / Prodi : Fikom/Ilmu Komunikasi
  - e. Bidang keahlian : Manajemen Pendidikan
  - f. Telepon : 08126952861
  - g. Email : [iswadi@esaunggul.ac.id](mailto:iswadi@esaunggul.ac.id)
3. Jumlah Anggota Dosen : 4 orang
4. Jumlah Anggota Mahasiswa : - orang
5. Periode/waktu kegiatan : (Juli-Desember 2022)
8. Luaran yang dihasilkan : Luaran Wajib : Artikel di Jurnal Nasional ber- ISSN Terakreditasi Sinta 2  
Luaran Tambahan : -
9. Usulan/Realisasi Anggaran :
  - a. Dana Internal UEU : -
  - a. Sumber dana lain : Rp 2. 550.000,-

Jakarta, 26 Desember 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

Mengetahui,

Ka. Pusat Studi

Ketua Tim Peneliti,



Universitas  
**Esa Unggul**  
Fakultas Ilmu Komunikasi

Prof. Erman Anom, Drs., MM., Ph.D.

NIDN/NIK: 0324096301/293060015



Dr. Halomoan Harahap, M.Si.

NIDN/NIK: 0322106301/202100216



Dr. Iswadi, M.Pd.

NIDN/NIK: 0101117901/-

Mengetahui,

Ka. LPPM



Universitas  
**Esa Unggul**  
LPPM  
05/01/2023

Dr. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M. Sc

NIDN/NIK: 0326058403/209100388

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengajaran agama secara formal kepada anak didik bukanlah tugas yang mudah. Pendidikan Agama (apapun agamanya) bukanlah ilmu yang serba pasti. Ada banyak persoalan di sini: Pertama: tuntutan kurikulum yang hendak mengukur kemampuan siswa hanya dari angka belaka juga merupakan sesuatu yang problematis bagi Pendidikan Agama, karena penghayatan religius tentu tidak bisa disempitkan begitu saja dalam angka. Kedua, mengajarkan Pendidikan Agama amat berkaitan dengan soal metodologi, yakni bagaimana cara mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didik. Jika mendidik adalah soal bagaimana mentransfer pengetahuan, cukupkah dengan menyampaikan aneka kebenaran agamis dan dogmatis ke dalam sistem pengajaran agama? Hal tersebut diperumit dengan pluralitas khas Indonesia karena bangsa ini terdiri dari aneka suku, agama, bahasa, dan budaya.

Dalam Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003) memerintahkan supaya setiap anak didik mendapat Pendidikan Agama sesuai dengan keyakinannya dari guru yang seagama. Harus diakui persoalan pluralitas agama di Indonesia ternyata tidak selesai dengan mengajarkan agama sesuai dengan keyakinannya. Mengapa? Karena yang justru mengemuka setelah Undang-Undang Sisdiknas tersebut disahkan adalah formalisme sempit yang tampil dalam berbagai bentuk, dan semakin menguatnya derajat intoleransi agama (Lubis, 2014:4). Situasi semacam ini diperparah pula oleh munculnya aksi fanatis oleh berbagai kelompok dan ormas di berbagai tempat yang semakin menjauhkan Indonesia dari Pancasila sebagai falsafah hidup bersamanya (Riyanto, 2000:16).

Hasil survey Media Indonesia serta penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Media Indonesia, 2011:4) terhadap guru pendidikan agama Islam dan siswa SMP-SMA tentang toleransi terhadap agama lain menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi kehidupan bersama. Survey tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah menjadi sumber bertumbuhnya sikap membenci dan intoleransi terhadap mereka yang berbeda agama, dan ironisnya hal ini dilakukan oleh guru-guru agama. Survey juga menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap aksi kekerasan cukup tinggi, begitu juga tingkat kesediaan mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan terkait isu agama. The Wahid Institute bahkan merilis hasil kajiannya tentang masih tingginya semangat antitoleran di antara kaum beragama di Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 setelah Undang-Undang Sisdiknas diterapkan. Sepanjang Januari



sampai dengan Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus (dari intimidasi, pelanggaran, hingga serangan fisik), sedangkan pada tahun 2012 terjadi 278 kasus (The Wahid Institute, 2014:2).

Menurut sejarah Indonesia dan dunia, Agama memiliki andil yang besar dalam menimbulkan kebencian, meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian, dan mengundang konflik (Haryatmoko, 2010: 82). Haryatmoko (2010:82-83) bahkan mengatakan bahwa agama justru kerap kali memberikan landasan ideologis dan membenaran simbolis bagi aneka konflik. Bukannya memecahkan masalah bangsa, Pendidikan Agama justru menjadi bagian dari masalah ketika fanatisme agama kerap kali menjadi sumber konflik. Pendidikan Agama yang eksklusif tersebut ternyata belum memekarkan semangat hidup bersama yang seharusnya mengembangkan dimensi inklusivitas.

Pancasila merupakan pondasi hidup berbangsa yang diterima oleh masyarakat. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia ber-Ketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila juga mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat antitoleran ketika memuat di dalamnya dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Realitas dewasa ini dan aneka penelitian di atas mengatakan bahwa pengakuan akan Pancasila sebagai falsafah hidup bersama dan realitas pendidikan ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Di titik inilah penggalian akan Pancasila menjadi amat relevan. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum harus digali kembali untuk memberikan pemahaman baru mengenai berbagai permasalahan bangsa yang dewasa ini terjadi, juga ketika menggagas Pendidikan Agama yang tepat di Indonesia.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam. Ragam budaya dan agama di provinsi ini dapat saja menjadi permasalahan jika segala aturan yang diterapkan tidak berlandaskan pancasila dan agama. Seperti pernyataan Tanwier (dalam Fadlia dan Ramadani, 2020: 41) bahwa hubungan antara umat beragama yang toleran itu ketika tidak terlibat dalam konflik yang menyebabkan pertumpahan darah. Di Banda Aceh tidak pernah terjadi pergesekan antara kaum minoritas dan mayoritas hingga mengakibatkan pertumpahan darah dan mengorbankan nyawa akibat konflik antar agama seperti yang pernah terjadi di Ambon dan Kupang. Pernyataan ini jelas mendukung bahwa Aceh merupakan daerah yang menerima keberagaman.

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan karya ilmiah ini adalah, 1) medeskripsikan pembelajaran pancasila di dalam pendidikan formal; 2) pembelajaran agama Islam di sekolah; 3) pembelajaran pancasila berlandaskan agama dan; 4) pancasila di Aceh.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, secara umum masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pancasila di dalam pendidikan formal?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran agama Islam di sekolah?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pancasila berlandaskan nilai-nilai agama?
4. Bagaimana aplikasi pembelajaran pancasila di Aceh?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut,

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pancasila di dalam pendidikan formal.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pembelajaran agama Islam di sekolah.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan pembelajaran pancasila berlandaskan nilai-nilai agama.
4. Mendeskripsikan dan menjelaskan pembelajaran pancasila di Aceh.

## **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori maupun praktik pendidikan dan pembelajaran pancasila khususnya pada sekolah-sekolah di Aceh serta diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bentuk sebuah inovasi pembelajaran pancasila yang lebih menarik sehingga bisa merubah pola tingkah laku peserta didik

### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendidikan terkait dengan pembelajaran pancasila berlandaskan nilai-nilai agama yang merupakan salah satu pondasi pembelajaran yang inovatif dan menarik serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian berikutnya.

### **2. Secara Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya

1. Peserta didik yang mempelajari pancasila dalam kelas-kelas formal
2. Dosen
  - a. Menyajikan sebuah inovasi dan variasi pembelajaran untuk mengatasi permasalahan pembelajaran pada mata pelajaran pancasila

- b. Semoga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi dosen dalam pembelajaran bahasa Inggris pada ranah keterampilan berbicara
  - c. Peneliti selaku tenaga pengajar mata kuliah pancasila dalam rangka meningkatkan kompetensi professional dan pedagogik
3. Bagi Perguruan Tinggi
    - a. Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan pembelajaran di kampus serta sebagai masukan bagi dosen-dosen yang ada di lembaga ini
    - b. Dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu dosen yang kelak dapat direkomendasikan dalam penentuan alternatif metode yang lebih tepat dalam pembelajaran
  4. Bagi khayalak/umum dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang pendidikan.

#### **E. Hasil yang Diharapkan (Luaran)**

Luaran dalam penelitian ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal kependidikan yang terbit pada bulan Desember 2022 dengan link <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/6233>



## BAB II

### RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

#### A. Renstra Penelitian

Terdapat 7 (tujuh) Tema Sentral Unggulan LPPM Perguruan Tinggi yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation) dan Ketahanan dan Keamanan Pangan (*Food Safety and Security*)
2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (New and Renewable Energy)
3. Kualitas Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Obat-Obatan (*Health, Tropical Diseases, Nutrition and Medicine*)
4. Penerapan Pengelolaan Bencana (*Disaster Management*) dan Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (*Nation Integration and Social Harmony*)
5. Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi (*Regional Autonomy and Decentralization*)
6. Pengembangan Seni dan Budaya/Industri Kreatif (*Arts & Culture/ Creative Industry*) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*)
7. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*).

Dari 7 (tujuh) tema sentral di atas, maka pelaksanaan penelitian menetapkan tema sentral rencana strategis penelitian adalah nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), sebagai ruang lingkup penelitian.

#### B. Peta Jalan

Dari penetapan tema sentral rencana strategis penelitian pada nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), maka ditetapkan isu strategis adalah nomor 7 masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan.

## BAB III

### Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

#### A. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul Pembelajaran Pancasila Berlandaskan Agama Islam di Aceh, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan memberikan informasi yang signifikan.

Hasil Penelitian yang disimpulkan Umar (2019) bahwa pembinaan nilai religius pada masyarakat Indonesia sangat penting, mengingat Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras dan golongan. Hal ini tampak pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembinaan nilai religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan agama untuk meneguhkan keyakinan akan kebenaran agama dan nilai-nilainya. Selain itu, pembinaan nilai religius dapat dilakukan pembiasaan melalui ibadah yang diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Pembinaan nilai religius juga perlu didukung dengan penghayatan nilai-nilai agama sejak dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Temuan penelitian Mansir (2021) menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara pendidikan agama Islam dan Pancasila dalam menanggulangi konflik. Konflik yang sering terjadi di sekolah yaitu perselisihan antar siswa, pertentangan adu kekuatan, masalah kecil yang sering kali dibesarkan dan masalah percintaan remaja yang dimana pada fase ini para siswa sudah mulai mengenal perasaan suka antar lawan jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam sangat strategis dan menempati garda terdepan karena keduanya sebagai arus utama dalam menangkal hal-hal negatif bagi kehidupan beragama, sehingga ia berperan aktif untuk menanggulangi berbagai kekerasan dan konflik yang terjadi di lembaga pendidikan.

Begitu juga Yoga (2019) mengemukakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jika dikaitkan dengan perspektif filsafat, maka sebenarnya adalah perlu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam membudayakan hasil pikiran dalam kehidupan nyata. Apabila pembudayaan hasil pikiran mendalam dihubungkan fungsi Pancasila, maka sesungguhnya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itu, apapun aktivitas bangsa Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah



yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Pandangan Hidayat (2020) bahwa Penguatan semangat kebangsaan merupakan hal terpenting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat bernegara berdasarkan Pancasila adalah fondasi dasar keutuhan dan kesatuan bangsa. Penguatan semangat kebangsaan merupakan hal terpenting apalagi di daerah-daerah pasca konflik seperti Aceh. Untuk itu proses penguatan semangat kebangsaan bisa dilakukan melalui proses pendidikan yaitu dengan memaksimalkan peran penting Pendidikan Kewarganegaraan dalam mentransformasi nilai-nilai pancasila kepada generasi muda. Sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi sikap dan perilaku yang mencerminkan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pancasila**

Dinamika Pancasila Dasar Filosofi Demokrasi Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan. (Natal. 2017).

Kepercayaan terhadap eksistensi Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, budaya ekonomi, politik, pendidikan dan pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar filosofi dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila mulai tergeser akibat berbenturan dengan terjadi krisis kepemimpinan nasional, krisis ekonomi dan politik pada masa transisi reformasi. Mengakibatkan hampir disegala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami keterpurukan. Salah satu yang paling esensial ada dalam kehidupan demokrasi Pancasila, terutama menterjemahkan dasar filosofi demokrasi Pancasila yang tertuang dalam sila keempat seharusnya dapat dilakukan secara konsisten. Tidak harus merubah implementasi demokrasi pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan tidak langsung melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh institusi legislatif, berubah dipilih

langsung oleh rakyat yang sesungguhnya sangat liberal tidak sesuai dengan mawah atau ruh dari nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila.

Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai collective ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. (Yoga. 2019).

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemological, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila.

Sebagai dasar filosofis-ideologi berbangsa dan bernegara, maka Pancasila harus diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen dalam segala aspek kehidupan, yaitu dengan menyatukan nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai hakikat dari pedoman hidup berbangsa, dengan kondisi riil bangsa yang sudah mengalami sublimasi politik. Artinya harus tetap mempedomani Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Termasuk di dalamnya implementasi dalam bidang politik-demokrasi pemilihan kepala daerah, harus tetat taat azas berlandaskan dasar filosofi ideologi Pancasila. Perubahan dapat terjadi secara signifikan pada tataran implementasi susatu sistem, namun pada tataran filosofi tidak boleh (bukan tidak dapat atau tidak bisa) dirubah.

Perubahan pada dasar filosofi akan berakibat terjadi pertentangan antara nilai-nilai, norma, hakikat dan esensi dari suatu konsensus awal membentuk negara Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma, nilai-nilai dan hakikat filosofi ideologi Pancasila. Misalkan sistem demokrasi pemilihan kepala daerah, dimana secara hakikat harus tetap sesuai dengan nilainilai, norma dan esensi dari sila keempat Pancasila. Artinya sistem secara hakikat tetap seperti adanya, namun perubahan dapat terjadi pada tataran pelaksanaan agar menjadi lebih baik.

Analoginya demokrasi pada sistem pemilihan kepala daerah tetap secara tidak langsung sebagai konsekuensi logis hakikat filosofis-ideologis dari sila keempat Pancasila, namun perubahan dapat terjadi secara signifikan pada tataran operasional, kelembagaan, pengawasan yang ketat dari lembaga anti rasuah KPK, Keplosian dan partisipasi masyarakat. Tujuannya 14 agar tidak terjadi praktik kolusi, nepotisme, korupsi (sogok-menyogok, jual beli suara di legislatif) dan perbaikan pada tata cara mekanisme pemilihan agar lebih transparan, bersih dan sederhana. (Syamsu dan Aliaras. 2020).

Demokrasi Pancasila, sudah dikenal sejak kemerdekaan negara RI, namun mulai sangat populer pada era Orde Baru. Dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah Ketetapan MPRS Nomor. XXXVII/MPRS/1968, tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan atau sesuai dengan diktum Tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila (Ajat. 2015). Konsep demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pimpinan tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal „mufakat bulat“ tidak tercapai. Menurut Konsep Demokrasi Pancasila sesuai Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya „musyawarah untuk mufakat secara bulat“, maka jalan yang dapat dilakukan dengan voting (pemungutan suara). Hal ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun dan pengarah (*guiding principles*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. (Syamsu dan Aliaras. 2020). Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan tersebut, yaitu :

#### **Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.



3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

### **Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
3. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
6. Berani membela kebenaran dan keadilan
7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
8. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

### **Sila Ketiga : Persatuan Indonesia**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

**Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

2. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
3. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
5. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
6. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
7. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
8. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
9. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
10. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
11. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

**Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Perhatikan pada nilai-nilai dan norma pada sila keempat, yang memberikan pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan hakikat falsafah ideologi Pancasila, adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berarti secara esensi, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah, harusnya lebih mengedepankan permusyawaratan dan kemufakatan antara semua elemen yang menjadi perwakilan sebagai representasi dari kedaulatan rakyat.

## **2. Urgensi Pendidikan Karakter**

Seiring dengan arus globalisasi yang telah masuk dalam seluruh relung kehidupan, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pembangunan karakter dirasa segera untuk dikaji di implementasikan di pendidikan formal (sekolah). Kata urgen dimaknai sebagai sebuah kemendesakkan. Mendesak artinya segera untuk diatasi, segera dilaksanakan, dan jika tidak akan ada potensi yang membahayakan. Sesuatu dikatakan mendesak karena ada tanda-tanda yang mengharuskan suatu tindakan dilaksanakan, dapat pula waktunya sangat mepet sehingga harus segera mungkin.

Perlunya pendidikan karakter mendesak untuk dilaksanakan adalah adanya gejala - gejala yang menandakan tergerusnya karakter bangsa. Tanda-tanda merosotnya karakter bangsa Indonesia, menyampang apa yang dinyatakan Thomas Lickona (dalam Barnawi dan M. Arifin, 2016: 12-13), tentang sepuluh tanda zaman yang kini terjadi, yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja (atau bahkan anak-anak).
- b. Membudayanya ketidakjujuran.
- c. Sikap fanatik terhadap kelompok/grup (geng) tertentu.



- d. Rendahnya rasa hormat terhadap orang tua atau guru.
- e. Semakin kaburnya moral baik dan buruk.
- f. Penggunaan tutur bahasa yang kian memburuk ( makian, cacian, ejekan, hujatan, fitnah, mesoh, alay) tanpa memperhatikan perasaan orang lain.
- g. Meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, judi dan seks bebas.
- h. Rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara.
- i. Menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga.
- j. Kurangnya kepedulian diantara sesama.

Di era seperti sekarang ini, ancaman hilangnya karakter semakin nyata. Nilai-nilai karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan dalam memahami makna kebebasan sebagai anak kandung demokrasi diterjemahkan sebagai free will, kebebasan berkehendak tanpa aturan yang baku, iklim kebebasan tidak jarang diartikan dengan kebebasan bertindak. Tawuran antar pelajar, antar kampung, main hakim sendiri, dan sebagaimana berlangsung di berbagai tempat, sekaligus menjauhkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkarakter, dan berakhlak mulia. Fenomena rusaknya karakter akan semakin cepat ketika masyarakat pengguna teknologi tidak memahami filosofi teknologi sehingga salah dalam memanfaatkan dan memandang nilai fungsi teknologi. Sebagai contohnya, fungsi HP yang mestinya untuk komunikasi dan menyimpan data penting banyak oleh masyarakat digunakan untuk dokumentasi hal-hal yang privat. Karena tidak memiliki pengetahuan teknologi yang cukup, HP tersebut mudah pindah tangan sehingga datanya tersebar ke mana-mana. Dampak dari merosotnya karakter, secara individu jelas, seseorang yang melakukan salah satu tindakan (dari 10 yang dipaparkan di atas) berpotensi bermasalah dengan hukum, terlibat dalam kekerasan, hilangnya percaya diri, dan menjadi individu yang tidak jelas, tidak memiliki karakter.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan Karakter untuk semua tingkat pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi. Munculnya gagasan program pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat dimaklumi, sebab selama ini dirasakan proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Banyak yang menyebut bahwa pendidikan telah gagal membangun karakter. Banyak lulusan sekolah dan sarjana yang pandai dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi mentalnya lemah, penakut dan perilakunya tidak terpuji. Namun

demikian pendidikan karakter yang dilaksanakan memang tidak serta merta akan menampakkan bentuk / hasil, tetapi merupakan proses panjang.

### **3. Hakekat Pendidikan Karakter**

Dalam kajian pendidikan dikenal sejumlah ranah pendidikan, seperti pendidikan intelek, pendidikan keterampilan, pendidikan sikap, dan pendidikan karakter (watak). Jika ditilik dari pengalaman sejarah bangsa, pendidikan karakter sesungguhnya bukan hal baru dalam tradisi pendidikan di Indonesia. Beberapa pendidik Indonesia modern seperti R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, kemandirian nasional (*National and character building*) Soekarno, Hatta, Moh. Natsir dan lain sebagainya, telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka alami. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman, agaknya menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan di setiap pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, pada masa Orde Lama, untuk membantu pembentukan karakter bangsa Pendidikan Budi Pekerti masuk menjadi salah satu pelajaran dalam kurikulum SD 1947, Pendidikan Budi Pekerti lantas bergabung dengan Pendidikan Agama dalam Kurikulum 1964 dengan nama Agama/Budi Pekerti, juga ada mata pelajaran khusus tentang kewarganegaraan yang sering disebut civics (Soepardo dkk dalam Doni Koesoema A, 2011: 49).

Pada masa Orde Baru, bahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dibudayakan dengan lebih sistematis lagi dengan cara mewajibkan untuk mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan diadakan sebuah mata pelajaran khusus, yaitu kewarganegaraan Negara Indonesia, Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa pemikiran tentang pendidikan karakter itu tetap bergulir dalam sejarah pendidikan bangsa.

### **4. Konsep Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter merupakan pendidikan ihwal karakter, atau pendidikan yang mengajarkan hakekat karakter dalam ketiga ranah cipta, rasa, dan karsa. Makna pendidikan karakter dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Menurut Suyanto (2009), menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. b) Samsuri (2015) menyatakan bahwa termologi “karakter” sedikitnya memuat dua hal : value (nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang : mentalitas, sikap, dan perilaku. c) Safan Amri,dkk (2011:4) mendefinisikan pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter adalah dengan mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sebagai fondasi agar terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya bisa menjadi manusia insan kamil yang memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hakekat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

## **5. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter**

Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 Nilai Karakter yang akan ditamamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Berikut akan dipaparkan mengenai 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas antara lain : a) Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. b) Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. c) Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. d) Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. e) Kerja Keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. f) Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. g) Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. h) Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. i) Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk



mengetahui lebih mendala dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. j) Semangat Kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. k) Cinta Tanah Air. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. l) Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. m) Bersahabat/Komunikatif. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. n) Cinta Damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. o) Gemar Membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. p) Peduli Lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. q) Peduli Sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. r) Tanggung Jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Kementerian Pendidikan Nasional, dalam Suyadi, 2013: 8-9).

Penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan (embeded) ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan maksud agar dapat tercapai sebuah karakter yang selama ini semakin memudar. Setiap mata pelajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mapel yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

## **6. Kebijakan Dan Grand Design pendidikan Karakter**

Pendidikan formal tidak pernah lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai struktur kurikulum, kompetensi yang harus dicapai, sistem evaluasi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pendidikan karakter, ada beberapa kebijakan yang diundangkan sebagai pijakan hukum pelaksanaan pendidikan karakter di tanah air.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2016: 43), ada beberapa rujukan penyusunan kebijakan nasional pendidikan karakter : a) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2007

tentang RPJPN 2005 – 2025. b) Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. d) Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesra tanggal 18 Maret 2010. e) Arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional di Tampak Siring, Bali Tanggal 19-20 April 2010.f) Arahan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Merdeka Tanggal 11 Mei 2010.

Karakter seseorang tidak terlepas dari pendidikan dan pola asuh orang tua di rumah. Karakter seseorang dibentuk dari apa yang dipelajarinya di sekolah, dalam keluarga di rumah, dan di masyarakat. Ketiga wilayah tersebut merupakan sebuah sistem. Seseorang siswa tidak akan memiliki karakter yang baik jika salah satu dari tempat beraktualisasinya bermasalah. Sekolah yang kondusif dalam penyemaian pendidikan karakter tidak akan efektif membentuk karakter siswa jika situasi rumah tidak kondusif dan terjadi chaos moral masyarakat. Seseorang yang berasal dari keluarga yang baik berpotensi rusak karakternya jika lingkungan sekolah kacau dan teman bergaul salah, begitu juga dengan kondisi yang lain yang tidak saling bersinergi dalam penyemaian karakter anak.

Untuk itulah pembudayaan dan pemberdayaan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara bersama. Proses pembudayaan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap seseorang sejatinya sebuah intervensi. Intervensi mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan tafsir dan dalam mempermudah dan mempercepat pendidikan karakter.

Pembudayaan dan pemberdayaan akan efektif jika dibarengi dengan proses pembiasaan atau habiturasi. Pembiasaan berpedoman pada kebijakan yang diambil, adanya standar baku (pedoman), disesuaikan dengan kondisi lingkungan, dan sumber daya yang dimiliki. Transfer nilai-nilai luhur dalam diri anak melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat outcome yang diharapkan adalah terwujudnya perilaku berkarakter.

Adapun *grand design* pendidikan karakter dapat dideskripsikan sebagai berikut : a) Pendidikan karakter berpijak pada landasan filosofis yang bersumber pada agama, Dasar Negara, UUD 1945, dan kebijakan pendidikan yang teruang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) Nilai-nilai luhur dalam pembelajaran disampaikan dengan teori belajar yang tepat, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis peserta didik, dengan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat atau latar belakang peserta didik. c) Pengalaman-pengalaman, baik yang bersifat nyata maupun fiksi, dapat menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan karakter (Barnawi & M. Arifin, 2016: 50-51).

## **7. Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah**

Kualitas pembelajaran menjadi kunci dalam peningkatan sumber daya manusia. Pembelajaran yang berkualitas merupakan pembelajaran yang terencana dan sengaja diciptakan, bukan belajar yang terjadi secara insidental. Menurut Sri Anita W, dkk. (2008 : 1.18) menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa dan guru.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen atau unsur : “tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru.

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pembelajaran di atas dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran memiliki ciri-ciri: 1) Merupakan upaya sadar dan disengaja; 2) Pembelajaran harus membuat siswa belajar; 3) Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; 4) Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Dengan demikian penyusunan lesson plan harus benar-benar faktual dan struktur operasional.

Desain pembelajaran merupakan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan sebelum seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Desain sistem pembelajaran terdiri atas empat komponen yang memiliki hubungan fungsional antara, a) materi pembelajaran, b) kompetensi pembelajaran, c) strategi pembelajaran, d) evaluasi pembelajaran (Barnawi & Arifin, 2016: 66).

## **8. Model Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah**

Menurut Riyanto (2010), Dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah terdapat empat (4) tawaran model penerapan, yaitu : a) Model otonomi dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, b) Model integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran, c) Model ekstrakurikuler melalui sebuah kegiatan tambahan yang berorientasi pembinaan karakter siswa, d) Model kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model tersebut dalam seluruh kegiatan sekolah.

Menurut Darmuin, dkk (2013: 20-21) menyebutkan pendekatan Pendidikan Karakter (Model Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter), diantaranya : a) Keteladanan. Satuan



pendidikan formal dan non formal harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai nilai karakter yang akan dikembangkan. Perilaku pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakantindakan yang baik sehingga menjadi panutan bagi peserta didik.

b) Pembelajaran di Kelas. Setiap materi pelajaran atau kegiatan yang dirancang khusus. Setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, afektif, konatif dan psikomotor.

c) Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Semua Materi Pelajaran. Subtansi secara eksplisit atau implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi dalam Standar Inti (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). Memastikan bahwa setiap pembelajaran materi pembelajaran memiliki dampak instruksional dan/atau dampak pengiring pembentukan karakter.

d) Pengintegrasian dalam Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler. Semakin bermakna jika diisi dengan berbagai kegiatan bermuatan nilai yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik.

e) Pemberdayaan dan Pembudayaan. Pengembangan karakter dapat dilihat pada dua segi, yaitu pada segi makro dan mikro. Segi makro bersipat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.

f) Penguatan. Penguatan di mulai dari lingkungan terdekat dan meluas pada lingkungan yang lebih luas. Penguatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penataan lingkungan belajar dalam satuan pendidikan formal dan non formal yang menyentuh dan membangkitkan karakter.

## **9. Penilaian Pendidikan Karakter**

Penilaian Pendidikan karakter dilakukan dalam bentuk non tes melalui pengamatan; anekdote; tugas; laporan dan sebagainya. Pendidik memberikan kesimpulan / pertimbangan tentang pencapaian indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan / pertimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif dan memiliki makna terjadinya proses pembangunan karakter sebagai berikut :

a) BT : Belum Terlihat, peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator;

b) MT : Mulai Terlihat, sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator,

c) MB : Mulai Berkembang, sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten,

d) MK ; Membudaya, peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten (Darmuin dkk, 2012: 47)

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Bahan dan Alat Penelitian**

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahan dan alat yang memang benar-benar benar-benar dibutuhkan untuk terselenggaranya penelitian. Alat dan bahan ini digunakan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, membuat laporan dan luaran penelitian.

- a. Bahan Penelitian, meliputi : (1) referensi makalah dan artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, (2) buku-buku kepustakaan yang relevan, (3) kertas.
- b. Alat Penelitian, meliputi : (1) instrument penelitian, (2) komputer, laptop, gawai, (3) jaringan internet, (4) wifi atau paket internet, (5) alat scan, (6) *memory card* hp, dan (7) alat tulis.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian penelitian secara fisik berlokasi di Aceh, namun sebaran tempat penelitian bisa berada dimana-mana sesuai dengan keberadaan objek penelitian pada saat pengambilan data penelitian berlangsung. Sedangkan waktu penelitian secara total, sejak penyusunan proposal, pengambilan data, analisis data, menyusun laporan penelitian dan membuat luaran penelitian berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional adalah dengan durasi waktu selama 4 (empat) bulan.

#### **C. Prosedur Penelitian**

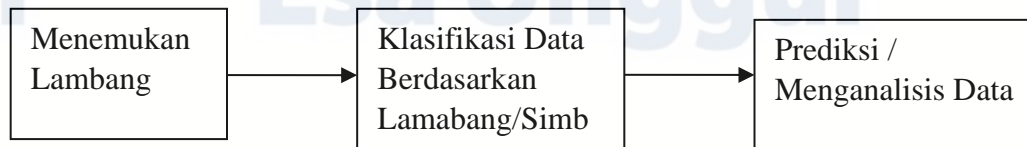
Pada prosedur penelitian ini, akan disajikan tentang desain, metode dan sumber data penelitian. Desain penelitian kuantitatif deskriptif, maksudnya penelitian dilakukan dengan metode diskriptif. Pada dasarnya metode deskriptif adalah penelitian yang pengolahan data dalam bentuk persentase. Digunakannya metode diskriptif, karena mefokuskan pada masalah-masalah yang langsung berhubungan sekarang, sehingga bisa langsung diperoleh akurasinya dengan situasi dan kondisi adanya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan *content analysis* yaitu studi tentang proses dan isi komunikasi (Bungin 2003: 67). Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang

sering memiliki proporsi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan kompleks.

Dalam penelitian pembelajaran Pancasila berlandaskan agama Islam di Aceh digunakan teknik pengumpulan data teknik interaktif dengan *content analysis*. Teknik simak, baca, catat, dan riset pustaka.



**Gambar 1 : Teknik *Content Analysis***

**(Bungin, 2003 :68)**

## 5. Validasi Data

Data yang sudah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Validasi data menggunakan triangulasi data model mengalir (*flow model of analysis*). Triangulasi adalah proses pengumpulan data secara representatif. Data dikatakan representatif apabila sudah tak lagi menemukan fenomena baru dalam pengumpulan data. Triangulasi data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu,

- triangulasi data (*data triangulation*), peneliti menggunakan data untuk mengumpulkan data yang sama.
- triangulasi peneliti (*investor triangulation*) yaitu pengecekan keabsahan data dengan menggunakan peneliti lain.
- triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu pengecekan keabsahan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda atau pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- triangulasi teori (*theoretical triangulation*) yaitu mengecek data dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

Dari keempat macam teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi data untuk mengumpulkan data yang sama. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap

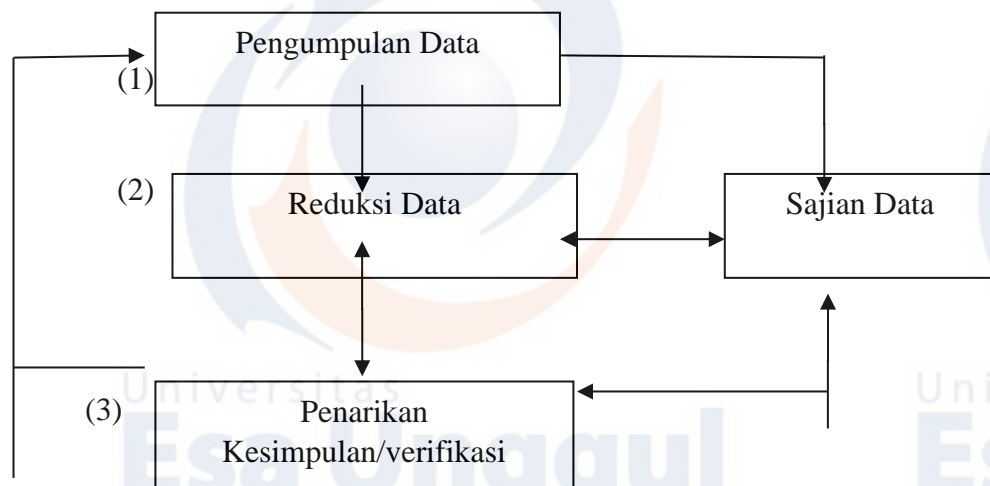


kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian data yang diperoleh dari sumber yang satu akan lebih teruji bila dibandingkan dengan sumber data lainnya yang berbeda.

Triangulasi metode peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data yang sejenis yaitu mencatat dokumen dan menganalisis. Triangulasi teori peneliti gunakan untuk mengecek data dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dan berupa kegiatan yang bergerak pada ketiga alur kegiatan proses penelitian. Kegiatan analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut,



**Gambar 2.**

### **Skema Analisis Interaktif Data, Miles & Hurberman, (Sutopo, 2006 : 120)**

Teknik analisis data yang bersifat kualitatif memerlukan penjelasan yang deskriptif. Teknik analisis data terdiri dari tiga data alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa pada waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh, peneliti selalu membuat reduksi data dan penyajian data. Data berupa catatan lapangan terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. Dari kedua kegiatan tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat berupa pokok-pokok temuan yang penting, yang disebut reduksi data. Kemudian dilakukan penyusunan penyajian data berupa cerita sistematis dan logis sehingga makna peristiwanya

dapat lebih jelas untuk dipahami. Dari sajian data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sementara dilanjutkan verifikasi.

Apabila simpulan dirasakan kurang lengkap karena kurangnya rumusan data dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk digunakan mendukung simpulan yang telah dikembangkan semua dilakukan untuk pendalaman data. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan simpulan yang memuaskan.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pembelajaran Pancasila**

Pancasila adalah sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan wilayah geografis menjadi sebuah bangsa yang tunggal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian dan pandangan hidup masyarakat wilayah nusantara sejak dahulu.

Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan berbangsa yang memuat nilai-nilai luhur sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal, bahkan sangat relevan dengan kemajuan zaman dan mampu menguasai tantangan masa depan. Ini tentang penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi bagi sebuah bangsa merupakan cara pandang dalam menyelenggarakan negaranya, karena ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas:

1. nilai dasar yang menjadi cita-cita, dan
2. nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut (Dianasari, 2018)

Pendidikan Pancasila sebagai pembentukan karakter bagi seluruh warga negara Indonesia berperan penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. Pendidikan Pancasila sangat penting, terutama bagi pelajar. Pemberian pengajaran Pancasila kepada setiap siswa sebagai bentuk pembinaan budi pekerti dan moral sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila bertujuan untuk mencegah munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang dapat membahayakan negara dan juga agar setiap siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Pengembangan Penguatan Karakter (PPK) memiliki lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yaitu, religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri sendiri,



melainkan saling berinteraksi satu sama lain yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi (Kemendikbud, 2017).

Pertama, nilai karakter religius yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Kedua, nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Ketiga, nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Keempat, nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Kelima, nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif,

mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

## 2. Pembelajaran Agama Islam di Sekolah

Sekolah merupakan wadah dalam pembentukan karakter anak didik. Setiap sekolah tentunya mewajibkan adanya mata pelajaran agama untuk pembentukan karakter siswa yang taat dalam menjalankan agamanya.

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan untuk mengenal, mengetahui, memahami dan mengikuti aturan dan ruang lingkup agama Islam, (Mansir, 2020). Pendidikan berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara atau pun melatih. Bila diartikan dari segi etimologi atau bahasa, Pendidikan Agama Islam yaitu proses dalam memberikan pengajaran atau bentuk kontribusi seorang pendidik baik dalam akhlak maupun kecerdasan berpikir. Kemudian jika diambil dari segi terminologi atau istilah, Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk lebih memperdalam spiritual keagamaan, *self esteem*, kepribadian yang baik, kecerdasan dalam akhlak, dan juga keterampilan yang nantinya akan diimplementasikan pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini sendiri merupakan program dalam mengimplementasikan pendidikan mental-spiritual dan juga moral kepada para peserta didik, (Sanusi, 2013). Bagaimanapun juga peran pendidik atau guru mata pelajaran Agama Islam ini harus memantau dan mengupayakan untuk melakukan perbaikan konsep materi pelajarannya, (Mumtahanah, 2018). Akan lebih baik lagi jika dalam menyajikan materi agama Islam ini diberikan konsep pembelajaran yang menyenangkan supaya peserta didik tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai mata pelajaran agama Islam. Hal ini juga yang dapat membuat peserta didik menyerap lebih mudah mengenai materi tersebut. Tujuannya adalah supaya peserta didik memahami dan mengenal lebih jauh tentang ilmu-ilmu agama Islam.

Pembelajaran diartikan sebagai melatih dan memelihara yang bermakna memerlukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam melakukan kegiatan (Mansir, 2017). Seperti halnya dalam ruang lingkup sekolah, dalam mendidik seseorang (peserta didik) diharuskan memiliki tujuan yang pasti dan terarah dalam upaya pencapaiannya. Dalam proses pengenalan ini terdapat banyak faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam melakukan proses belajar mengajar agama Islam, baik faktor eksternal guru maupun dari media ajar yang

berguna untuk membantu guru dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar ini. Sudah bukan rahasia lagi jika minat dalam belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah Indonesia tidak terlalu besar.

Hal ini dikarenakan jam belajar yang diberikan terbatas, yaitu hanya sekitar dua jam setiap mata pelajaran. Sedangkan banyaknya materi yang seharusnya diberikan tidak cukup jika hanya diberikan melalui waktu dua jam tersebut. Kendala pada siswa hendaknya menjadi pertimbangan pendidik itu sendiri dikarenakan tidak semua siswa yang ada dapat langsung memahami isi dari materi ajar secara mandiri. Belum lagi jika terdapat beberapa peserta didik yang tidak dapat menangkap materi pembelajaran tersebut, ini menyebabkan pendidik atau guru agama Islam tersebut mengalami kebingungan sendiri. Selain tujuan tercapainya materi ajar tidak tersampaikan secara maksimal kepada siswa, ia juga menjadi sesuatu sebagai evaluasi agar kedepannya mengenai materi atau pun segala bahan ajar yang telah ia berikan kepada peserta didik dapat diterima dengan baik. Pembelajaran Agama Islam memiliki istilah atau makna tersendiri dari beberapa pengertian diantaranya:

1. Pembelajaran agama Islam merupakan pendidikan yang dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber dasar ajaran Islam.
2. Pembelajaran agama Islam merupakan upaya untuk mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup seseorang.
3. Pembelajaran agama Islam merupakan ajaran yang sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga saat ini masih berkembang berkaitan dengan agama Islam dan sejarah umat Islam.

Dari beberapa istilah yang telah disebutkan di atas tersebut dapat ditarik benang merahnya jika Pembelajaran agama Islam merupakan upaya untuk membimbing calon generasi penerus di masa depan nanti agar dapat memiliki kepribadian baik dan pastinya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri (Sinaga, 2017). Dari sinilah nantinya akan lahir generasi penerus yang berkepribadian baik. Jika seseorang telah memiliki kepribadian muslim pastinya nanti ia menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan atau pedoman hidupnya (Mansir, 2020). Tentunya juga dari cara berpikir dan menyikapi suatu tindakan sesuai dengan ajaran dan pandangan Islam. Dengan begitu tujuan dari Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah upaya yang berupa bimbingan baik secara jasmani atau rohani kepada peserta didik secara Islami. Semua ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.



### 3. Pembelajaran Pancasila Berlandaskan Agama

Mata pelajaran pancasila, (Dewantara, 2015) dan Pembelajaran Agama Islam sangatlah penting (Kuswanto, 2014), yakni berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam yang menjadi pondasi dalam kehidupan perlu dikenal dan dipahami. Hal ini juga dikarenakan Pendidikan Agama Islam bersifat *urgent* (penting) untuk dipelajari dari mulai zaman lahirnya Islam hingga akhir zaman nanti.

Tujuan dari pendidikan yaitu sebagai proses atau upaya untuk menyiapkan masa depan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup yang tepat, (Walidaik, 2017). Berbagai upaya telah dilaksanakan hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Terutama saat ini sudah memasuki zaman yang mengandalkan *cyber* sebagai rutinitas keseharian. Sehingga ini membuat seseorang untuk lebih mawas diri dalam menggunakan dan memanfaatkan internet agar tidak tersesat dalam menggunakannya. Peran pendidikan agama Islam disini supaya anak didik mampu mengendalikan perilakunya agar tidak seenaknya dalam mengambil sikap. Hal ini dikarenakan anak dan juga remaja rentan mengikuti atau meniru bagaimana orang sekitar dalam berperilaku. Oleh karenanya dalam Islam diberikanlah pedoman untuk hidup lebih baik supaya dapat memanfaatkan hidup yang singkat ini dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan nilai yang dapat diimplementasikan oleh siswa, maka pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa seperti akhlak yang baik, yang dapat diimplementasikan dengan bagaimana cara bersikap yang baik atau menanggapi perilaku seseorang dengan baik juga tanpa harus berlaku kasar atau menyakiti, (Mumtahanah, 2018). Ini merupakan salah satu bentuk mengimplementasikan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam.

Penyampaian sesuatu yang benar dapat menggunakan adab dan tutur kata yang baik, ini untuk menghindari diri sendiri dari menyakiti orang lain. Pendidikan Pancasila sangat konsen pada persoalan ini, sebab hal ini dapat mencerminkan sikap dan kepribadian seseorang sebagai anak bangsa. Dalam konteks pembelajaran agama Islam (Hidayat, 2015), apabila orang lain merasa sakit hati karena perkataan yang keluar dari lisan seseorang, maka itu akan membuat individu mendapatkan dosa karena telah membuat orang lain terluka. Maka dari itu, di dalam Pendidikan Agama Islam, adab merupakan sesuatu hal yang penting. Selain ini merupakan bentuk implemementasi dari pembelajaran Akhlak yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pendidikan Pancasila. Oleh sebab itu adab sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Hal ini selaras dengan semangat yang dimiliki dalam nilai Pancasila yang mengajarkan kepada siswa tentang sikap hidup toleransi bermasyarakat.

Cara mengimplementasikan nilai Pancasila dan pembelajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan beragama dan berbangsa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syari'atnya masing-masing. Dalam ilmu fiqih umat muslim diharuskan benar-benar sejalar dengan apa yang sudah diperintahkan. Karena jika keluar dari jalur dan tidak sesuai tuntunan maka itu sama dengan menentang ajaran Islam yang sudah ada sejak Islam lahir. Ini juga merupakan antisipasi untuk tidak melakukan hal yang terlarang dalam melaksanakan ibadah. Pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) memiliki makna Pancasila bagian pedoman dan pegangan dalam kehidupan serta memberikan tuntunan perilaku masyarakat bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Karena itu kemudian, sebagai sumber nilai dan etika, seperti halnya Pendidikan Agama Islam, maka nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila sebaiknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat harmonis, dinamis, aman, tertib dan religius.

Contoh konteks di sekolah adalah pertikaian pada siswa sering terjadi mulai pada saat masih berada di Taman Kanak-kanak hingga masa peserta didik sudah memasuki ke jenjang sekolah menengah atas. Tidak hanya sedikit permasalahan, tetapi bisa melahirkan segunung masalah. Mulai dari permasalahan kecil antar sesama teman, kesalahpahaman dengan teman kelas, atau mungkin dengan angkatan yang lebih tua atau muda dari peserta didik tersebut. Bahkan peserta didik juga melakukan kesalahan dengan guru mereka masing-masing yang tidak sengaja atau hanya sebatas salah paham. Tidak dapat dipungkiri jika datangnya permasalahan ini juga awalnya juga sebatas candaan atau masalah kecil, namun akhirnya malah berlanjut hingga memperpanjang masalah.

Pada masa sekolah, siswa biasanya mulai usil atau mulai bertingkah yang kurang baik pada saat remaja, (Ibda, 2012). Hal ini secara psikologis dikarenakan pada saat remaja hormon seseorang dapat dikatakan sedang tingi-tingginya. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan dalam suatu masalah, terkadang belum berpikir secara tepat, atau dalam mengambil keputusan mereka masih belum bisa bertanggungjawab dengan pilihannya. Hal ini yang menjadikan ketika di usia tersebut remaja masihlah dikatakan labil, meskipun terdapat beberapa remaja yang juga sudah bisa menempatkan tanggung jawabnya.

Dari uraian di atas, mengungkap bahwa pendidikan pancasila dan pendidikan agama islam pada dasarnya memiliki muara dan misi yang sama, sehingga keduanya diperlukan dalam merespon berbagai persoalan peserta didik di lembaga pendidikan Indonesia, (Mansir, 2018). Oleh karena itu, dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam, keduanya

menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan cara yang baik, bijaksana, adil, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam harus bisa menerima dan memahami jika terdapat perbedaan yang ada. Karena perbedaan tersebut di dalam Islam lazimnya disebut sebagai rahmat. Maka dengan adanya perbedaan itu, akan menimbulkan adanya sikap saling menghormati, menghargai pendapat atau perbedaan orang lain. Tentu dalam konteks ini yang diharapkan adalah jiwa pancasila dan motivasi keagamaan yang diperlukan.

#### **4. Pancasila di Aceh**

Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Aceh memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah juga membuktikan masyarakat Aceh memiliki loyalitas dan semangat kebangsaan yang tinggi untuk bangsa Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan diraih Aceh dilupakan dengan segala apa yang telah disumbangkan bagi tegaknya bangsa Indonesia. Aceh seperti dianaktirikan oleh penguasaan bangsa ini, sumber daya alamnya dikuras tapi pembangun dan kesejahteraan masyarakat tidak kunjung diberikan. Peristiwa ini yang menjadi awal bagi Aceh untuk menentukan nasib sendiri sehingga bergemuruh gendang peperangan di bawah komando Daud Beureuh.

Menurut Antonio dkk (2002) “Konflik adalah suatu tindakan suatu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, mengganggu pihak lain yang mana hal ini terjadi antara kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu”. Konflik merupakan suatu proses sosial individu atau kelompok yang bertujuan memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Kusnadi (2002:67) menyatakan bahwa konflik beberapa bentuk konflik yang terjadi:

1. Konflik vertikal merupakan konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antar atasan dan bawahan dalam sebuah kantor.
2. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi diantara organisasi massa.
3. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrem. Contohnya, konflik yang terjadi di Aceh.



Konflik pasca perdamaian di Aceh sampai saat ini masih ada namun sedikit berbeda dan dengan warna yang berbeda serta sifatnya tidak terbuka, intensitasnya juga rendah tetapi perjuangan untuk merdeka tidak pernah berubah. Tujuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah memisahkan diri dari Indonesia. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan kemerdekaan bagi rakyat Aceh. ini juga terbukti sampai sekarang masih banyak butir-butir perjanjian MOU Helsinki yang belum dipenuhi oleh pemerintah RI dan adanya pro-kontra terhadap pasal-pasal di dalamnya seperti lambang bendera Aceh. Kemungkinan-kemungkinan tersebut suatu-waktu bisa menggiring konflik terbuka antara GAM dan RI. Kemungkinan terburuk ini harus tetap diwaspadai dan dijaga oleh kedua belah pihak karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat yang telah dibangun selama ini dan mengganggu integritas bangsa serta etnisitas suku yang ada di Aceh.

Hampir setengah abad gejolak konflik bergema di tanah rencong ribuan nyawa tak berdosa mati demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bangsa Aceh. Semangat kebangsaan yang tinggi terhadap Indonesia berganti menjadi kebencian yang mendarah daging. Pada saat konflik terjadi masyarakat Aceh mengalami krisis semangat kebangsaan. Pada saat itu hal-hal berkaitan dengan Indonesia dan Pancasila menjadi hal yang tabu karena dimata orang Aceh yang sampai akhirnya ditemukan titik terang menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Aceh.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut,

1. Pembelajaran pancasila mengandung nilai karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong
2. Pembelajaran agama Islam merupakan sebuah upaya yang berupa bimbingan baik secara jasmani atau rohani kepada peserta didik secara Islami
3. Cara mengimplementasikan nilai Pancasila dan pembelajaran Agama Islam dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan beragama dan berbangsa
4. Pancasila berlandaskan Islam di aceh perlu dikembangkan demi menjaga kerukunan umat beragama dan meningkatkan rasa nasionalis di dalam diri siswa.

#### **B. Saran**

Ideologi Pancasila sebagai sumber inspirasi dan landasan filosofi bangsa, merupakan suatu keniscayaan bahwa nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini mengkaji Pembelajaran pancasila berlandaskan agama Islam di Aceh, sebagai refleksi pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dengan mempedomai temuan-temuan penelitian, disarankan :

- a. Perlu ada pokok bahasan pembelajaran yang mendalam tentang Filsafat Pancasila yang diisersi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan/atau berdiri sendiri. Bukan sekedar pokok bahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat.
- b. Pendidikan Pancasila sebagai matakuliah keperibadian, pembelajarannya harus berimbang di masing-masing domain : kognitif, afektif dan psikomotor. Kurikulum pembelajaran Pendidikan Pancasila dewasa ini lebih cenderung didominasi oleh domain kognitif saja.

## Daftar Pustaka

- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. ] CIVIS, 5(1).
- Dianasari, D. (2018), “Penanaman Karakter Siswa Melalui Transfer Nilai-nilai Pancasila Pada Mata Pelajaran Budi Pekerti”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon 2018, (April), pp. 181–192.
- Fadlia, F. (2020). Toleransi Ala Aceh (Intoleransi): Sebuah Analisis Sense Of Place Dalam Pendirian Rumah Ibadah Agama Minoritas Di Aceh.
- Haryatmoko, 2010, Dominasi Penuh Muslihat Anti Kekerasan dan Diskriminasi, Gramedia, Jakarta
- Hermawan, Iwan. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode.
- Hidayat, R. (2020). Penguatan Karakter Kebangsaan Pasca Konflik Di Aceh. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(1), 22-32.
- Ibda, F. (2012). Pendidikan moral anak melalui pengajaran bidang studi PPKn dan pendidikan agama. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 12(2).
- Ismail, S. (2020). Penanaman Nilai Inti Pendidikan Karakter Berlandaskan Pancasila Pada Peserta Didik Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(1), 157-172.
- Kuswanto, E. (2014). Peranan Guru PAI dalam Pendidikan Akhlak di Sekolah. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6(2), 194–220.
- Lubis, Todung Mulya, 2014, “Bertumbuhnya Ideologi Kebencian,” dalam Kompas 30- 01-2014
- Mansir, F. (2020). The Urgency of Fiqh Siyasa In Islamic Education Learning At Madrasahs And Schools. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 142–154.
- \_\_\_\_\_. (2021). The Urgency of Fiqh Education and Family Role in The Middle of Covid-19 Pandemic For Students In School and Madrasah. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(1), 1–10.
- Mansir, F., & Kian, L. (2021). Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Kehidupan Beragama. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 250-263.
- Media Indonesia, “Intoleransi Guru Pendidikan Agama Islam Membahayakan Keutuhan Bangsa” dalam Media Indonesia 27-02-2011
- Mumtahanah, M. (2018). Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(01), 19–36.



Nadiah, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7875-7883.

Rahayu, MH.Sri. 2019. "Strategi Membangun Karakter Generasi Muda Yang Beretika Pancasila Dalam Kebhinekaan Dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Pendidikan* 28(3):304.

Riyanto, Armada., 2000, Agama-Kekerasan, Membongkar Eksklusivisme, Malang, STFT Widya Sasana

Sanusi, H. P. (2013). Peran Guru PAI Dalam pengembangan Nuansa religius di sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 11(2), 143–153.

Sinaga, S. (2017). Problematika pendidikan agama islam di sekolah dan solusinya. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 14.

Umar, M. (2019). Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 71-77.

The Wahid Institute, 2014, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013, Jakarta